

**ANALISIS DAMPAK PEMBIAYAAN UMKM DAN BELANJA
PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI SULSEL
PERIODE 2017 s.d. 2022**

**ANALYSIS OF THE IMPACT OF MSME FINANCING AND GOVERNMENT
SPENDING ON POVERTY LEVELS IN SYLSEL PERIOD 2017 to 2022**

Ikwan Mahmud; Saiful; Rasnindah Abu Rais

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palopo

ABSTRAK

Tingkat kemiskinan merupakan persoalan yang masih menjadi tantangan terbesar dalam pencapaian tujuan bernegara. Pemerintah melalui berbagai bauran kebijakan fiskal memberikan perhatian besar dalam penanganan masalah kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak kebijakan fiskal melalui proksi variabel treasury, atau variabel yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsi DJPb selaku institusi treasury di Indonesia. Variabel dimaksud adalah Belanja APBN, KUR, dan UMi. Penelitian menggunakan data panel dengan total 120 observasi, dari gabungan data cross section di 24 kab/kota di Sulsel dan data time series tahun 2017 s.d. 2022. Metode regresi yang digunakan adalah Random Effect Model (REM) yang dikenal juga sebagai Error Component Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel treasury signifikan secara statistik memberikan dampak positif bagi penurunan tingkat kemiskinan di Sulsel.

Kata kunci: Poverty, APBN, KUR, UMi, IPM

ABSTRACT

The poverty rate is still amongst the biggest problem to achieve national goals. The government through fiscal policy pays great attention to dealing with the problem. The objective of this study is to analyze the impact of fiscal policy through treasury variable proxies, or variables that are directly or indirectly related to the functions of DGT as a treasury institution in Indonesia. The variables are State Budget Expenditures, KUR, and UMi. The study uses panel data, which is a combination of cross-sectional data in 24 regencies/cities in South Sulawesi and time-series data from 2017 to 2022. The regression method used is the Random Effect Model (REM), also known as the Error Component Model (ECM). The results showed that all treasury variables are statistically significant to give a positive impact on reducing poverty rate in South Sulawesi.

Keywords: Poverty, APBN, KUR, UMi, IPM

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan tujuan bernegara, salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Salah satu indikator kesejahteraan umum yang paling mudah didefinisikan adalah tingkat kemiskinan pada periode tertentu, baik di daerah maupun secara nasional.

Target tingkat kemiskinan setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-

undang tentang APBN. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, target tingkat kemiskinan nasional pada rentang 8,5% s.d. 9%. Bahkan target tersebut kembali ditingkatkan di tahun 2023 menjadi 7,5% s.d. 8,5%.

Tingkat kemiskinan di Sulsel senantiasa lebih rendah dari capaian nasional. Terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan secara gradual periode pengamatan 2017 s.d. 2019. Di tahun 2020, hadirnya pandemi Covid-19 memberikan

dampak nyata bagi tren penurunan tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan nasional meningkat dari 9,22% menjadi 10,19%, demikian halnya Sulsel mengalami peningkatan dari 8,56% menjadi 8,99%. Dengan usaha keras pemerintah melalui kebijakan fiskal yang terstruktur dan dinamis dalam kerangka PC-PEN, angka kemiskinan kembali ke tren penurunan sehingga tahun 2022 persentase kemiskinan menjadi 9,57% untuk nasional dan 8,66% untuk Sulsel.

Alat atau instrumen penting kebijakan fiskal pemerintah dalam menggapai tujuan bernegara, tercermin pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam ketentuan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 mengenai Keuangan Negara disebutkan bahwa APBN/APBD memiliki peran/fungsi setidaknya sebagai instrumen stabilisasi, distribusi dan juga alokasi.

Fungsi stabilisasi dimaknai sebagai instrumen pemerintah melalui anggaran untuk memelihara dan menjaga keseimbangan fundamental ekonomi. Peran inilah yang banyak mengemuka diperankan APBN di masa-masa ketidakstabilan ekonomi, termasuk akibat dampak pandemi;

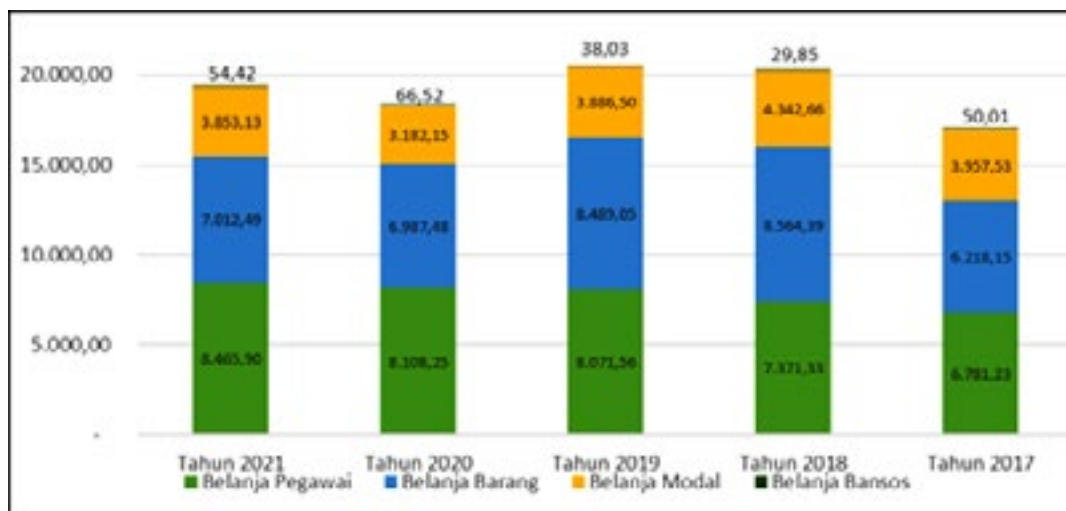
Fungsi distribusi bermakna sebagai instrumen kebijakan pemerintah yang mengatur agar anggaran negara dipastikan untuk memenuhi aspek kepatutan dan keadilan.”

Fungsi alokasi sebagai upaya pemerintah untuk mengarahkan anggaran negara untuk program pengurangan pengangguran dan kemiskinan, terhindar dari pemborosan sumber daya, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas kondisi perekonomian negara.”

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Variabel treasury yang merupakan proksi kebijakan fiskal pemerintah yang terdiri atas belanja pemerintah, KUR, dan UMi memberi dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan di Sulsel.
- Belanja pemerintah berfungsi sebagai instrumen alokasi, distribusi, dan stabilisasi bagi berbagai indikator kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar penyaluran belanja APBN cepat dan berkualitas
- Pembiayaan KUR yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan dan mendapat subsidi dari pemerintah secara empiris terbukti bermanfaat bagi sektor UMKM dan pada akhirnya berimplikasi pada menurunnya tingkat kemiskinan.
- Penyaluran pembiayaan UMi yang dilakukan oleh LKBB kepada sektor paling bawah UMKM memberi dampak positif bagi penurunan tingkat kemiskinan.
- KUR dan UMi perlu terus didorong termasuk dengan melibatkan pemerintah daerah, baik dalam monev maupun alternatif tambahan pendanaan maupun subsidi bunga.

Grafik 2. Realisasi Belanja KL di Wilayah Sulsel TA 2017 s.d. 2021 (Miliar Rupiah)



Sumber: MEBE Ditjen Perbendaharaan (diolah)

Di tengah terjadinya krisis dan kelesuan ekonomi, termasuk yang disebabkan oleh hadirnya pandemi, peran kebijakan fiskal semakin penting. Kondisi pelemahan dan ancaman resesi ekonomi harus disikapi pemerintah dengan kebijakan ekspansif melalui peningkatan belanja dan/atau penurunan target penerimaan. Salah satu indikator penting yang menunjukkan ekspansifnya belanja pemerintah adalah lahirnya PC-PEN, sesuai amanat Perpu nomor 1 tahun 2020, yang diikuti penyediaan anggaran yang besar.

Dari publikasi APBN KiTA, diketahui bahwa realisasi belanja yang dilaksanakan kementerian/lembaga (K/L) pada APBN tahun anggaran 2021 mencapai 2.000,7 triliun atau meningkat 9,2% dari realisasi 2020 yang mencapai mencapai Rp1.833 triliun. Realisasi di wilayah Sulsel berdasarkan data MEBE Dit PA menunjukkan bahwa belanja K/L hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp19,38 triliun” atau meningkat 5,6 persen dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp18,3 triliun. Realisasi belanja APBN melalui Kementerian/Lembaga (K/L) per jenis belanja di wilayah Sulsel tergambar pada grafik 1 di atas.

Selain secara langsung melalui belanja K/L, kebijakan fiskal pemerintah juga dapat dilaksanakan melalui kebijakan spesifik berupa pembiayaan kepada sektor-sektor unggulan, antara lain UMKM serta ultra mikro. Terdapat 2 (dua) kebijakan besar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM, yakni program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)..

KUR sejak tahun 2007 menjadi andalan pemerintah dalam menutupi gap pembiayaan UMKM. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. KUR yang disalurkan oleh lembaga keuangan mitra pemerintah, menasar pemberian pembiayaan atau kredit investasi dan/atau modal kerja kepada para debitur perseorangan, kelompok usaha yang layak dan produktif tapi belum mempunyai atau tidak mencukupi agunan tambahan.

Penyaluran KUR setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan sesuai target yang ditentukan pemerintah. Dari data dashboard “Sistem Informasi Kredit Program” atau SIKP, penyaluran KUR tahun 2021 mencapai

Rp282,8 triliun kepada 8,36 juta debitur. Data tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dari kinerja penyaluran KUR tahun sebelumnya dengan jumlah Rp192,12 triliun kepada 6,86 juta debitur. Tren yang sama juga terjadi di wilayah Sulsel yang terdiri atas 24 kab/kota. Berdasarkan data SIKP, penyaluran tahun 2021 secara total mencapai Rp14,67 triliun kepada 430 ribu debitur. Jumlah tersebut meningkat 33,1% dibanding dengan realisasi 2020 sebesar Rp11,01 triliun kepada 403 ribu debitur. Perkembangan penyaluran KUR di wilayah Provinsi Sulsel sejak tahun 2017 hingga 2021 tergambar pada grafik 3 berikut:

Program kedua yang menjadi andalan pemerintah dalam membiayai sektor UMKM adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi memfasilitasi kebutuhan modal usaha sektor paling bawah dan rentan dalam berusaha, yakni ultra mikro. Sektor ini belum bankable, sehingga memerlukan kebijakan khusus agar dapat mengakses permodalan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 193/PMK.05/2020 disebutkan bahwa UMi merupakan program fasilitasi bagi usaha ultra mikro dalam bentuk pembiayaan konvensional atau pembiayaan sesuai prinsip syariah. UMi dihadirkan untuk memudahkan akses fasilitasi pembiayaan yang mudah dan cepat sehingga diharapkan dapat menambah wirausaha yang terfasilitasi kebutuhan pendanaannya oleh pemerintah.

Untuk menyalurkan UMi, pemerintah bermitra dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Dengan menggandeng LKBB, diharapkan dapat mengatasi kendala pembiayaan akibat tidak memenuhi syarat pengajuan kredit ke lembaga keuangan (bank). Sebagaimana dikutip dari APBN KiTa, penyaluran UMi sejak tahun 2017 mencapai akumulasi Rp18 triliun dan menjangkau pelaku usaha tidak kurang dari 5,3 juta debitur, baik individu maupun kelompok usaha. Di wilayah Sulsel, total penyaluran telah mencapai Rp488,2 miliar dan menjangkau 135 ribu debitur.

Kebijakan fiskal pemerintah melalui proksi variabel treasury, antara lain belanja APBN, KUR, dan UMi diharapkan membawa dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan hingga di tingkat daerah. Kajian atas dampak kebijakan fiskal belanja pemerintah terhadap penurunan tingkat kemiskinan sudah banyak dilakukan baik menggunakan data perbandingan antar negara maupun data nasional dan wilayah. Hasil kajian empiris secara umum menunjukkan bahwa belanja pemerintah memberikan dampak positif secara langsung dan tidak langsung bagi penurunan tingkat kemiskinan baik di daerah maupun secara nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, dan dalam rangka melengkapi berbagai literatur sebelumnya, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak empiris beberapa variabel kebijakan fiskal yang terkait langsung dengan fungsi treasury yang diemban oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb). Variabel tersebut yakni belanja APBN, penyaluran KUR, dan pembiayaan UMi dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Sulawesi Selatan yang terdiri atas 24 kab./kota.

Ketiga variabel treasury tersebut, semuanya terkait dengan peran Ditjen Perbendaharaan selaku unit yang menerima pendelegasian atau kuasa dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Fungsi dan peran sebagai Kuasa BUN di daerah semakin penting melalui inisiatif program Regional Chief Economist (RCE). Hasil dan temuan penelitian dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan fiskal dan penguatan peran RCE sehingga tujuan bernegara, salah satunya pengentasan kemiskinan, dapat dicapai secara tepat dan terukur.

Melalui situs resmi BPS, disebutkan bahwa dalam pengukuran aspek kemiskinan, BPS memakai konsep kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau basic

needs approach. “Konsep ini merujuk ke standar Bank Dunia dalam Handbook on Poverty and Inequality.” “Sesuai pendekatan tersebut, kemiskinan dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, baik makanan maupun non makanan, yang dihitung dari aspek pengeluaran.” Penduduk masuk kategori penduduk miskin apabila memiliki pengeluaran per kapita secara rata-rata per bulan berada di bawah garis kemiskinan (GK).

GK merupakan nominal rupiah minimum pengeluaran yang dibutuhkan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan pokok selama satu bulan. Kebutuhan pokok dimaksud adalah kebutuhan makanan dan non makanan. Berdasarkan nilai perhitungan GK, dapat ditentukan jumlah maupun persentase penduduk miskin pada suatu periode.

Menurut PBB sebagaimana dikutip dari situsnya, kemiskinan tidak hanya sekedar kurangnya pendapatan namun dalam tataran lebih luas terkait dengan aspek sumber daya yang produktif untuk mencapai kehidupan berkelanjutan atau berkesinambungan. Isu terkait kelaparan, kekurangan gizi, akses terbatas pada pendidikan dan layanan dasar lainnya serta diskriminasi menjadi beberapa isu sentral yang terkait dengan kemiskinan.

Dalam rangka pengentasan masalah kemiskinan, kehadiran pemerintah menjadi sebuah hal yang wajib. UUD 1945 pun mengamanatkan negara untuk melindungi kesejahteraan umum. Instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut melalui kebijakan fiskal.

Berbicara mengenai kebijakan fiskal tidak dapat dipisahkan dari ekonom asal Inggris John Maynard Keynes yang pandangannya kemudian sering disebut sebagai Keynesian Economics. Keynes menyampaikan berbagai teori, salah satunya terkait keterlibatan atau campurtangan pemerintah dalam menstabilisasi perekonomian. Menurut Jahan, S., dkk (2014), beberapa prinsip utama Keynesian antara

lain: permintaan agregat (aggregate demand) dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk keseimbangan antara sektor swasta maupun pemerintah; Peningkatan belanja pemerintah akan menyebabkan output perekonomian akan meningkat, walaupun komponen pengeluaran lain, misalnya konsumsi dan investasi, tetap atau tidak mengalami perubahan. Keynesian economics juga menganggap bahwa komponen pengeluaran, termasuk dari pemerintah akan menghasilkan multiplier effects atau efek pengganda.

Secara definisi kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah melalui belanja dan penerimaan dalam rangka memengaruhi kondisi dan aktivitas ekonomi. Pemerintah secara umum menggunakan instrumen kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan serta penurunan tingkat kemiskinan (Horton, M. dan Asmaa E. (2020). Hubbard et.al (2012) sebagaimana dikutip dari artikel Kebijakan Keuangan Negara Bappenas (2018) menyatakan kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang ditempuh pemerintah melalui pengaturan angka pendapatan (pajak) dan perubahannya, belanja pemerintah serta transfer yang ditujukan untuk mengintervensi kondisi ekonomi.” Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah melalui pengaturan postur penerimaan dan belanja negara dalam mencapai berbagai tujuan pemerintah, antara lain penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, arah kebijakan fiskal pemerintah tertuang pada UU 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara serta Undang-Undang APBN setiap tahunnya. Pengelolaan fiskal dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan melalui pelaksanaan tugas antara lain: penyusunan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal; penyusunan rancangan APBN dan APBN-P; pemungutan pendapatan negara; pelaksanaan fungsi sebagai BUN;

penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan tugas lain dalam pengelolaan fiskal sesuai ketentuan.

Dengan luasnya ruang lingkup pelaksanaan tugas kebijakan fiskal, maka sebagian tugas tersebut didelegasikan oleh Menteri Keuangan ke jajaran atau unit di bawahnya, salah satunya pelaksanaan fungsi bendahara umum negara (BUN). Pendelegasian fungsi BUN tersebar di beberapa unit Kementerian Keuangan, salah satunya kepada Ditjen Perbendaharaan (DJPb). Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 diatur kewenangan BUN antara lain menetapkan kebijakan/pedoman pelaksanaan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran negara, penempatan uang negara serta pengelolaan dan penatausahaan investasi pemerintah. Fungsi-fungsi tersebut sebagian besar dilaksanakan oleh DJPb selaku otoritas treasury. Oleh karena itu, berbagai variabel kebijakan fiskal pemerintah yang menjadi tema sentral pembahasan kajian ini akan menggunakan istilah variabel treasury, karena terkait erat dengan tugas fungsi Ditjen Perbendaharaan. Variabel tersebut yakni: Belanja Pemerintah, KUR, dan UMi.

Terkait aspek belanja dalam APBN, DJPb memiliki kewenangan yang besar khususnya pada tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. DJPb beserta seluruh unit kerjanya selaku unit treasury secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran belanja K/L. Tujuan monev untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran serta kepatuhan terhadap berbagai ketentuan pelaksanaan anggaran.

Berbagai literatur dan penelitian telah menunjukkan bukti empiris mengenai dampak kebijakan belanja pemerintah terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dahmardeh, N., & Tabar, M. H. (2013) yang melakukan penelitian mengenai dampak belanja pemerintah terhadap penurunan tingkat kemiskinan di

Iran menunjukkan bahwa belanja konstruksi (infrastruktur) memberikan dampak positif bagi penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian lain dari Nugroho, P.E. (2017) menunjukkan bahwa belanja pemerintah secara sektoral antara lain di bidang pertanian, pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi, memberikan kontribusi atas penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Miara & A. Yunani (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa belanja pemerintah berdampak langsung serta signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh tidak langsung ke penurunan tingkat kemiskinan melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Penelitian Taruno, H.T. (2019) membuktikan secara empiris mengenai dampak positif belanja pemerintah di Kesehatan dan bidang pendidikan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan.

Sebagai anggota dari Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan juga terlibat secara langsung, baik melalui pengembangan SIKP, maupun melalui pelaksanaan monev dan survei kemanfaatan KUR oleh Kanwil DJPb.

Penelitian lain dari Antunes, A. dkk (2015) atas program subsidi bunga menunjukkan bahwa tidak terdapat efek signifikan subsidi bunga terhadap output dalam perekonomian, bahkan dapat berdampak negatif terhadap tingkat upah. Subkhan (2018) yang melakukan kajian mengenai dampak program penjaminan kredit pemerintah terhadap masyarakat miskin menemukan bukti empiris bahwa program tersebut memberikan dampak positif terhadap kemungkinan penurunan kondisi kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, penelitian dampak KUR terhadap tingkat kemiskinan belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian dengan subyek KUR lebih banyak difokuskan kepada dampak langsung terhadap perkembangan UMKM. Penelitian Ulfa, M. & Muh Mulyadi (2020) menunjukkan bahwa KUR

berdampak positif dan signifikan bagi upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar. Berkembangnya UMKM memberikan dampak positif bagi upaya pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan.

Selain fungsi selaku otoritas fiskal, Kementerian Keuangan juga memiliki tugas lain dalam bentuk *Special Mission Vehicles* (SMV). SMV dibentuk dalam rangka mendukung berbagai investasi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, penyediaan barang dan sarana prasarana publik yang dibutuhkan masyarakat walaupun secara komersial tidak menguntungkan. Beberapa fungsi yang menjadi tanggung jawab SMV antara lain penjaminan, pembiayaan, asuransi, dan investasi/pengelolaan dana. Salah satu SMV yang melaksanakan fungsi investasi/pengelolaan dana adalah Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dalam pelaksanaan tugasnya, PIP bertanggung jawab kepada Dirjen Perbendaharaan. PIP saat ini ditunjuk menjadi koordinator *collecting fund* program UMi. Program UMi merupakan program fasilitasi pembiayaan kepada sektor ultra mikro yang disalurkan melalui LKBB, yakni Pegadaian, PNM dan lembaga lain yang ditunjuk, dengan plafon pembiayaan maksimal Rp20 juta.

Berbicara mengenai *microfinance*, tak dapat lepas dari sosok Muhammad Yunus, selaku pendiri *Grameen Bank* yang didirikan tahun 1983 di Bangladesh. *Grameen Bank* merupakan institusi penyedia kredit mikro kepada masyarakat miskin agar dapat mandiri dan mengembangkan usaha. Berkat usahanya Muhammad Yunus menerima penghargaan Nobel di tahun 2006.

Literatur dan penelitian mengenai dampak pemberian kredit mikro kepada masyarakat miskin telah banyak dilakukan di mancanegara. Salah satu yang dapat dijadikan referensi dari Félix, E.G.S. dkk (2019) menunjukkan bahwa penyaluran *microcredit* di 11 negara berkembang memberikan dampak signifikan bagi penurunan angka kemiskinan. Hasil studi

yang sama juga menyimpulkan bahwa tenaga kerja dan pendidikan juga menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian mengenai dampak UMi belum banyak dilaksanakan. Ketersediaan data bisa jadi penghalang bagi para peneliti untuk melaksanakan kajian karena program UMi baru diluncurkan sejak tahun 2017 dan akses data atas penyaluran masih terbatas sehingga tidak menarik bagi peneliti. Salah satu penelitian mengenai UMi dilakukan oleh Hia, V. dkk (2021) menyimpulkan bahwa program UMi memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan produksi sektor UMKM akan tetapi tidak berdampak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi regional/PDRB.

Dikutip dari situs resmi BPS, “IPM merupakan indikator pengukuran ketercapaian target pembangunan kualitas hidup manusia. Organisasi multilateral di bawah naungan PBB, yakni UNDP, di tahun 1990 menginisiasi indeks ini dalam rangka meningkatkan awareness pentingnya manusia dan sumber daya yang dimiliki bagi pembangunan.”

Dalam laporan BPS mengenai IPM Tahun 2020, disebutkan bahwa indeks dalam IPM terbentuk dari rata-rata pengukuran ketercapaian tiga aspek utama pembangunan manusia, yakni: 1) Aspek pengetahuan dihitung dengan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun serta lama rata-rata sekolah bagi penduduk berusia lebih dari 25 tahun; 2) Aspek standar hidup layak dihitung dengan pengeluaran real perkapita;” 3) Aspek umur panjang dan hidup sehat dihitung berdasarkan usia harapan hidup di saat lahir.

Literatur dan kajian mengenai dampak IPM bagi upaya penyelesaian masalah kemiskinan telah banyak dilakukan peneliti. Penelitian Elistia, E. dkk (2018) menunjukkan hubungan positif antara IPM dengan pendapatan perkapita penduduk di 10 negara ASEAN. Peningkatan kualitas manusia akan berdampak pada peningkatan kondisi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan

pendapatan perkapita akan berdampak bagi pengurangan angka kemiskinan. Penelitian lain dari Yusuf, L.A. dkk (2020) menyimpulkan bahwa IPM berdampak bagi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif regresi linear data panel dengan bantuan aplikasi EViews 12. Data yang digunakan adalah gabungan cross-section sejumlah 24 daerah di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) dan data runtun waktu tahun 2017 s.d. 2021, sehingga terdapat data observasi sebanyak 120. Data yang menjadi obyek analisis antara lain belanja K/L baik secara total maupun per jenis belanja, data KUR dan program UMi. Ketiga variabel berkenaan diposisikan sebagai proksi atas kebijakan fiskal pemerintah yang secara langsung terkait tugas DJPb selaku treasury. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah variabel treasury untuk ketiga jenis variabel dimaksud. Data lain diperoleh dari BPS, yakni tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan data dummy untuk mengetahui dampak Covid-19 sejak hadir di tahun 2020.

Alasan menggunakan data panel pada penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris dampak variabel treasury hingga tingkat kab/kota di Sulsel. Alasan lain yang umum adalah ketersediaan data yang lebih banyak dibandingkan menggunakan data runtun waktu atau cross-section secara sendiri-sendiri. Dengan jumlah observasi yang lebih banyak maka dapat diperoleh data yang lebih informatif, bervariasi, mengurangi multikolinieritas antar variabel, degree of freedom lebih besar, dan lebih efisien (Gujarati, (2003).

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting pemerintah dalam mencapai kesejahteraan umum, termasuk pengentasan kemiskinan. Berbagai literatur telah menunjukkan bahwa belanja pemerintah

melalui APBN, baik agregat maupun sektoral memberi dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan. Di sisi lain tidak dapat diabaikan juga mengenai instrumen fiskal (kuasi fiskal) lain, termasuk program KUR dan UMi yang tujuan utamanya mendukung pengembangan dan kemajuan sektor UMKM dan memberikan trickle-down effect bagi penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan serta pengangguran.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjawab beberapa hipotesis penelitian, yakni:

- Belanja pemerintah pusat, baik secara agregat maupun per jenis belanja, memiliki dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan di wilayah Sulsel;
- Penyaluran KUR memiliki dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan di Sulsel;
- Pembiayaan UMi memiliki dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan di Sulsel;
- Hadirnya Covid-19 signifikan berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan di Sulsel.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber resmi Ditjen Perbendaharaan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan sumber lainnya. Data runtun waktu tahun 2017 s.d. 2021 digabungkan dengan data cross-section di lokus 24 kab/kota di wilayah Sulsel dan menghasilkan 120 observasi data panel.

Beberapa variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- Tingkat Kemiskinan tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk persentase (variabel dependen dengan notasi "Poverty");
- Realisasi belanja agregat K/L pada APBN tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk logaritma

- natural (variabel independen dengan notasi APBN);
- Realisasi belanja pegawai dalam APBN tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk logaritma natural (variabel independen dengan notasi Bel51);
 - Realisasi belanja barang dalam APBN tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk logaritma natural (variabel independen dengan notasi Bel52);
 - Realisasi belanja modal dalam APBN tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk logaritma natural (variabel independen dengan notasi Bel53);
 - Realisasi penyaluran KUR tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk logaritma (variabel independen dengan notasi KUR);
 - Realisasi penyaluran pembiayaan UMi tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk logaritma (variabel independen dengan notasi UMi);
 - Capaian IPM tahun 2017 s.d. 2021 di kab/kota se-Sulsel dalam bentuk angka indeks (variabel independen dengan notasi IPM).
 - DumCov merupakan variabel dummy dengan nilai antara 0 dan 1 untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap tingkat kemiskinan di kab/kota se-Sulsel.

Untuk mengetahui dampak variabel treasury dan variabel lainnya terhadap penurunan/ peningkatan angka kemiskinan di Sulsel, dilakukan regresi data panel menggunakan rumus pada persamaan 1 berikut ini:

$$\text{Povertyit} = \alpha + \beta_1 \text{APBNit} + \beta_2 \text{KURit} + \beta_3 \text{UMiit} + \beta_4 \text{IPMit} + \beta_5 \text{DumCov} + e \quad (1)$$

Sedangkan untuk melihat dampak belanja pemerintah secara detil berdasarkan

jenis belanja, dilakukan regresi dengan rumus sebagaimana pada persamaan 2 sebagai berikut:

$$\text{Povertyit} = \alpha + \beta_1 \text{Bel51it} + \beta_2 \text{Bel52it} + \beta_3 \text{Bel53it} + \beta_4 \text{KURit} + \beta_5 \text{UMiit} + \beta_6 \text{IPMit} + \beta_7 \text{DumCov} + e \quad (2)$$

Keterangan:

Poverty	=	Tingkat kemiskinan
APBN	=	Belanja K/L secara agregat
Bel51	=	Belanja Pegawai
Bel52	=	Belanja Barang
Bel53	=	Belanja Modal
KUR	=	penyaluran KUR
UMi	=	penyaluran UMi
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
Dumcov	=	variabel dummy dampak periodik pasca terjadinya Covid-19 sejak tahun 2020
α	=	konstanta
β	=	koefisien
e	=	error terms
i	=	individu (data kab/kota)
t	=	data runtun waktu

Regresi linear berganda data panel atau lebih tepatnya balanced panel karena setiap data cross-section dalam model memiliki jumlah runtun waktu yang sama, yakni 2017 s.d. 2021. Gujarati (2003) membagi regresi data panel dalam dua kelompok besar, yakni pendekatan fixed effects dan random effects.

Pendekatan fixed effects menggunakan lima asumsi, dua diantaranya adalah koefisien dan konstanta sama atau konstan untuk setiap individu dan waktu. Model ini di berbagai literatur diistilahkan sebagai Common Effect Model (CEM). CEM merupakan model regresi data panel paling sederhana dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Model selanjutnya mengasumsikan koefisien setiap individu sama namun konstanta bervariasi antar individu atau dikenal sebagai Fixed Effect Model (FEM) atau Least-Square Dummy Variabel (LSDV)

karena menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan konstanta antar individu. Salah satu kelemahan metode ini adalah penggunaan variabel dummy untuk masing-masing variabel independen. Misalnya model regresi menggunakan lima variabel, maka variabel dummy yang digunakan sebanyak empat. Hal tersebut menyebabkan degree of freedom semakin kecil.

Pendekatan random effects mengasumsikan variasi antar individu dan antar waktu tergambar melalui residual. Perbedaan koefisien antar individu diakomodir dalam error terms masing-masing. Model ini dikenal dengan istilah Random Effect Model (REM) atau Error Component Model (ECM). Berbeda dengan CEM dan FEM yang menggunakan regresi OLS, model REM menggunakan teknik Generalized Least Square (GLS).

Pemilihan model terbaik (CEM vs FEM vs REM) yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Langrange Multiplier (LM).

Uji Chow: memilih model CEM atau FEM:

- H_0 : Model CEM yang sesuai (Prob Cross-Section Chi Square $\bar{0},05$)
- H_1 : Model FEM yang sesuai (Prob Cross-Section Chi Square $\bar{0},05$)
- Uji Hausman: memilih model FEM atau REM:
 - H_0 : Model REM yang sesuai (Prob $\alpha^- \bar{0},05$)
 - H_1 : Model FEM yang sesuai (Prob $\alpha^- \bar{0},05$)
- Uji Langrange Multiplier (LM): memilih model FEM atau CEM:
 - H_0 : Model CEM yang sesuai (Prob $\alpha^- \bar{0},05$)
 - H_1 : Model REM yang sesuai (Prob $\alpha^- \bar{0},05$)

Agar estimasi atas model tidak bias atau BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas Uji Normalitas, Multikolinearitas,

Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi. Jenis pengujian yang dilakukan disesuaikan dengan model terbaik yang dipilih, apakah CEM, FEM, atau REM.

Langkah selanjutnya sebelum dilakukan interpretasi atas hasil regresi adalah Uji Koefisien Determinasi (R Square dan Adjusted R Square) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau kontribusi variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji lain adalah Uji F untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, serta Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemilihan Model dan Uji Statistik

Secara lengkap hasil pengujian untuk memilih model terbaik nampak pada Tabel 1 berikut yang merupakan ringkasan dari output Aplikasi EViews 12. Tujuan tabel ringkasan untuk memudahkan interpretasi atas berbagai data statistik yang dihasilkan dari aplikasi.

Hasil Uji Chow, Prob Cross-Section Chi Square $\bar{0},05$ yang berarti menolak H_0 dan menerima H_1 sehingga disimpulkan model FEM lebih baik daripada CEM.

Hasil Uji Hausman menunjukkan prob $\alpha^- \bar{0},05$ yang berarti H_0 diterima sehingga disimpulkan bahwa model REM lebih baik daripada FEM. Karena REM yang terpilih maka dilanjutkan dengan tes ketiga, yakni Uji LM untuk pemilihan model terbaik: CEM atau REM.

Hasil Uji LM ditunjukkan oleh probabilitas Breusch-Pagan (both) semua di bawah $0,05$, sehingga sehingga dapat disimpulkan model final yang akan dianalisis lebih lanjut adalah model REM.

Uji Statistik	Model 1		Model 2	
	Hasil	Kesimpulan	Hasil	Kesimpulan
Uji Model				
Uji Chow	<i>Prob Cross-Section Chi Square = 0,00000 atau kurang dari < 0,05</i>	FEM	<i>Prob Cross-Section Chi Square = 0,00000 atau kurang dari < 0,05</i>	FEM
Uji Hausman	<i>Prob Cross-Section Random = 0,1466 atau > dari 0,05</i>	REM	<i>Prob Cross-Section Random = 0,3823 atau > dari 0,05</i>	REM
Uji LM	<i>Prob Breusch-Pagan (Both) = 0,0000 atau < dari 0,05</i>	REM	<i>Prob Breusch-Pagan (Both) = 0,0000 atau < dari 0,05</i>	REM
Uji Asumsi Klasik				
Normalitas	<i>Prob Jarque-Bera = 0,044476 atau < dari 0,05</i>	Tidak Normal	<i>Prob Jarque-Bera = 0,075374 atau > dari 0,05</i>	Normal
Multikolinearitas	Seluruh koefisien korelasi < 0,08	Lolos uji	<i>Multikolinearitas terjadi terhadap Bel51 dan Bel52</i>	Bel52 & Bel53 dikeluarkan

Sumber: diolah dari output EViews 12

Pasca pemilihan model terbaik, yakni model REM, pengujian lanjutan adalah Uji Asumsi Klasik. Karena model yang terpilih adalah REM yang menggunakan metode GLS maka diasumsikan tidak mengalami masalah Heteroskedasitas dan Autokorelasi. Pengujian yang dilakukan hanya asumsi normalitas atas residual dan multikolinearitas.

Hasil uji normalitas atas residual pada persamaan menunjukkan hasil berbeda, sebagaimana terlihat pada Prob Jarque-Bera. Pada model 1 nilai Prob Jarque-Bera 0,044476 atau $\bar{}$ dari 0,05 sehingga terindikasi residual tidak normal. Di sisi lain, model 2 menunjukkan Prob Jarque-Bera 0,075374 atau $\bar{}$ dari 0,05 sehingga residual terdistribusi normal.

Tidak dilakukan treatment khusus atas data yang terdistribusi tidak normal pada model 1 dengan asumsi central limit theorem (CLT) (Gujarati, 2003) yang menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya data sampel yang digunakan maka data akan mengarah ke distribusi normal. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 120 sehingga diasumsikan memenuhi CLT.

Dari uji korelasi pada kedua model persamaan di atas, ditemukan multikolinearitas yang sangat tinggi pada model 2, yakni antara variabel Bel51 (Belanja Pegawai) dan Bel52 (Belanja Barang) dengan koefisien korelasi 0,915259. Secara teoritis, nilai di atas 0,8 dianggap mengarah pada pelanggaran asumsi

klasik, yakni multikolinearitas. Oleh karena itu, salah satu variabel akan dihilangkan.

Dilakukan perlakuan khusus untuk mengatasi pelanggaran asumsi klasik, multikolinearitas, dengan mengeluarkan salah satu variabel yakni Bel52. Bel53 sekaligus dikeluarkan dari model karena hasil regresi pada tidak signifikan secara statistik. Pertimbangan pemilihan Bel51 karena Belanja Pegawai merupakan bentuk transfer dari pemerintah ke masyarakat, khususnya pegawai pemerintah, sehingga meningkatkan disposable income yang diharapkan meningkatkan konsumsi di masyarakat dan berimplikasi positif bagi penurunan angka kemiskinan.

Langkah berikutnya adalah pengujian statistik lanjutan terhadap model persamaan terpilih agar benar-benar menghasilkan prediktor yang baik. Uji yang dilaksanakan yakni Uji t, Uji F, dan koefisien determinasi R2 dan Adjusted R2. Ringkasan output yang dihasilkan dari EViews tergambar pada Tabel 2 di halaman selanjutnya.

Semua variabel independen, baik pada persamaan 1 maupun persamaan 2, signifikan secara statistik berpengaruh secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap variabel dependen, ditunjukkan dengan prob t-stat yang di bawah 0,01, 0,05, dan 0,10. Uji F menunjukkan hasil yang sama, dengan Prob F-stat di bawah 0,05 pada kedua model, sehingga disimpulkan bahwa seluruh variabel independen signifikan berpengaruh pada variabel dependen, yakni

tingkat kemiskinan. Koefisien determinasi atau R² dan Adjusted R² menunjukkan hasil moderat, masing-masing 55% dan 53% pada model 1, serta 56% dan 54% pada model persamaan 2.

Estimasi output regresi sebagaimana pada persamaan 3 dan 4 berikut ini:

$$POVERTY = 45.85818 - 0.56002*APBN - 0.37128*KUR - 0.14810*UMI - 0.12394*IPM + 0.24920*DUMCOV + [CX=R] \quad (3)$$

$$POVERTY = 53.31217 - 0.78729*BEL51 - 0.40498*KUR - 0.14428*UMI - 0.14119*IPM + 0.36188*DUMCOV + [CX=R] \quad (4)$$

Ringkasan beberapa uji statistik dan koefisien yang diolah dari output EViews 12 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji t, F, R² dan Koefisien

Variabel	Model 1: Poverty		Variabel	Model 2: Poverty	
	Koefisien	t-Prob		Koefisien	t-Prob
C	45.85818	0.0000	C	53.31218	0.0000
APBN	-0.560028	0.0138	Bel51	-0.787298	0.0036
KUR	-0.371286	0.0347	KUR	-0.404984	0.0174
UMI	-0.148108	0.0008	UMI	-0.144281	0.0010
IPM	-0.123944	0.0041	IPM	-0.141197	0.0007
DUMCOV	0.249206	0.0765	DUMCOV	0.361884	0.0049
R ²	0.552280		R ²	0.562771	
Adjusted R ²	0.532643		Adjusted R ²	0.543594	
F-statistic	28.12468		F-statistic	29.34660	
Prob(F-stat)	0.000000		Prob(F-stat)	0.000000	
Jarque-Bera	6.225621		Jarque-Bera	5.205120	
Prob Jarque-Bera	0.044476		Prob Jarque-Bera	0.074084	

Sumber: diolah dari output EViews 12

PEMBAHASAN

Dampak Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan.

Belanja agregat K/L pada APBN di wilayah Sulsel signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Setiap terjadi kenaikan belanja pemerintah sebesar 1% akan memberikan dampak positif berupa turunya tingkat kemiskinan di angka 0,56%, dengan mengabaikan pengaruh variabel lain atau ceteris paribus. Demikian halnya jika variabel Belanja K/L agregat diganti dengan Bel51

(Belanja Pegawai) berdampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan. Setiap kenaikan Bel51 sebesar 1% akan berdampak pada menurunnya persentase kemiskinan sebesar 0,78%, ceteris paribus;

Hasil tersebut sesuai teori bahwa belanja pemerintah memberikan dampak positif bagi penurunan tingkat kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan dicapai baik melalui transmisi secara langsung maupun ditransmisikan melalui variabel lain atau variabel antara. Dampak langsung dicapai melalui pemberian bantuan atau transfer kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Dampak tidak langsung ditransmisikan antara

lain melalui peningkatan kondisi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli.

Walaupun memiliki dampak positif, namun kondisi keuangan pemerintah tidak bisa serta-merta melakukan ekspansi belanja dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Objectives function dari pemerintah tidak hanya pada aspek kemiskinan, namun indikator kesejahteraan lain perlu perhatian, dan semua aspek tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Variabel Belanja Pegawai yang menunjukkan hasil positif juga tidak serta merta dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah dapat menaikkan belanja kepada pegawai, karena setiap kenaikan belanja pegawai akan memberikan trade-off di sisi liability pemerintah, yakni penyediaan anggaran tambahan untuk belanja pensiunan pegawai. Langkah yang ditempuh pemerintah selama ini melalui kebijakan gaji ke-13 serta tunjangan hari raya (THR) merupakan langkah yang tepat untuk menjaga daya beli pegawai, sehingga diharapkan memberikan *trickle-down effect* bagi penurunan angka kemiskinan.

Selanjutnya yang perlu dioptimalkan pemerintah adalah peningkatan kualitas belanja dan output yang dihasilkan agar multiplier effect yang ditimbulkan jauh lebih besar. Upaya yang dapat dilakukan antara lain akselerasi realisasi belanja sejak awal tahun sehingga manfaat dari setiap kegiatan pemerintah dapat dirasakan sedini mungkin oleh masyarakat. Aspek penguatan monitoring dan evaluasi serta analisis atas dampak belanja pemerintah perlu dipertajam untuk mengetahui potensi inefisiensi dan inefektivitas dari setiap belanja. Posisi DJPb selaku treasury sangat strategis pada aspek ini melalui upaya akselerasi belanja sekaligus mengawal kualitas output belanja pemerintah.

Dampak Penyaluran KUR terhadap Tingkat Kemiskinan

Penyaluran KUR di wilayah Sulsel signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Setiap terjadi kenaikan penyaluran KUR sebesar 1%, akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 0,37% (persamaan 1) dan 0,40% (persamaan 2), ceteris paribus.

Upaya pemerintah dalam mendukung tumbuh kembangnya UMKM melalui program KUR perlu didukung karena telah mampu menyediakan pembiayaan murah bagi UMKM yang ingin melakukan ekspansi usaha. Sejak tahun 2020 lalu bahkan pemerintah melakukan upaya ekstra di tengah terjadinya pandemi yang menimbulkan terjadinya resesi ekonomi dan dampak sosial lainnya. Banyak upaya telah dilakukan pemerintah dalam mendukung sektor UMKM, antara lain program restrukturisasi kredit, tambahan subsidi bunga, sehingga biaya kredit semakin murah.

Implementasi KUR bukannya tanpa kendala. Yang banyak mengemuka adalah ketidaktepatan sasaran, di mana KUR yang tujuannya untuk usaha produktif justru digunakan untuk keperluan konsumtif.

Peran Kanwil DJPb selaku RCE dalam proses bisnis penyaluran KUR dilakukan melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta survei kemanfaatan, baik terhadap lembaga penyalur maupun kepada debitur.

Dampak Penyaluran UMi terhadap Tingkat Kemiskinan

Penyaluran pembiayaan UMi di wilayah Sulsel signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Setiap terjadi kenaikan pembiayaan UMi sebesar 1%, akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 0,14% pada kedua model, ceteris paribus.

Hasil tersebut sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya mengenai dampak microfinance terhadap pengurangan tingkat kemiskinan.

Sebagai sebuah program yang baru diluncurkan sejak tahun 2017, pembiayaan UMi telah mampu menyentuh lapisan ekonomi terbawah. Dikuti dari APBN KiTA Januari 2022, pembiayaan UMi telah terealisasi secara akumulatif hingga Desember 2021 sebesar Rp18 triliun kepada 5,3 juta debitur melalui 51 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Capaian ini melampaui target 4,9 juta pelaku usaha yang termaktub dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Upaya akselerasi penyaluran UMi hingga di pelosok daerah masih membutuhkan upaya lebih dari berbagai pihak. Di Sulsel, total penyaluran UMi sejak tahun 2017 hingga 2021 baru mencapai Rp488 miliar kepada 135 ribu debitur. Capaiann penyaluran masih sangat rendah dari total realisasi nasional, yakni 2,71% dari sisi nilai penyaluran dan 2,56% dari jumlah debitur nasional. Ruang untuk penyaluran pembiayaan yang lebih besar, khususnya di Sulsel masih terbuka lebar.

Seluruh KPPN mendapat penugasan untuk melaksanakan survei terkait keekonomian debitur UMi yang terdiri atas survei baseline dan endline yang pada intinya mengukur kemajuan debitur dan usaha yang dijalankan. Selain itu, KPPN secara berkala juga dilakukan monitoring atas ketepatan data penyaluran oleh LKBB.

Dampak IPM terhadap Tingkat Kemiskinan

IPM yang dimaksudkan sebagai variabel kontrol, juga signifikan berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan di Sulsel. Setiap kenaikan IPM sebesar 1 poin absolut, akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,12% (persamaan 1) dan 0,14% (persamaan 2), ceteris paribus.

Hasil tersebut sejalan dengan berbagai literatur yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. IPM merupakan indikator atas kualitas pembangunan SDM di suatu wilayah. Angka IPM yang tinggi, sejalan dengan kualitas SDM yang semakin baik dan produktif sehingga semakin besar peluang untuk meraih penghidupan yang lebih baik.

Nilai IPM Sulsel di tahun 2021 72,24 atau meningkat 0,31 poin dari capaian 2020 sebesar 71,93. IPM Sulsel senantiasa beriringan dengan angka IPM nasional yang di tahun 2021 sebesar 72,29 dan tahun 2020 71,94. Jika dibandingkan lebih lanjut antar kab/kota di Sulsel, masih terjadi simpangan yang cukup lebar antar nilai IPM. IPM Kota Makassar yang menduduki posisi tertinggi dengan nilai 82,66 jauh di atas nilai terendah pada Kab Jeneponto sebesar 64,56.

Dampak Covid-19 terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil regresi pada kedua model juga menunjukkan bahwa hadirnya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 s.d. 2021 signifikan berdampak bagi meningkatnya tingkat kemiskinan di Sulsel.

Hingga tahun 2019, tren penurunan angka dan tingkat kemiskinan masih berada pada jalur yang tepat. Namun pada tahun 2020, tren berbalik arah, ditandai dengan terjadinya kenaikan angka maupun tingkat kemiskinan penduduk di Sulsel, baik periode Maret maupun September 2020. Namun berkat berbagai upaya pemerintah melalui bauran berbagai kebijakan, termasuk PC-PEN, profil kemiskinan Sulsel di tahun 2021 menunjukkan tanda reversal ke tren penurunan. Bahkan tingkat kemiskinan periode September 2021, yakni 8,53% menunjukkan penurunan yang cukup signifikan bahkan berada di level lebih rendah dari periode September 2019, sebelum terjadinya krisis, yang berada di angka 8,56%.

Dikutip dari artikel di situs resmi Kementerian Keuangan, Kepala BKF mengatakan bahwa program PEN memberi kontribusi penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin.

KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan telah mampu menjawab hipotesis penelitian pada bagian sebelumnya.

Belanja agregat K/L, memiliki dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan di wilayah Sulsel. Walaupun jika diteliti lebih lanjut menggunakan data per jenis belanja, hanya Belanja Pegawai yang signifikan secara statistik memberikan dampak penurunan tingkat kemiskinan. Belanja Barang secara statistik juga signifikan, tapi mengalami korelasi yang tinggi dengan variabel Belanja Pegawai sehingga dikeluarkan dari model persamaan. Belanja Modal tidak dimasukkan dalam model final karena secara statistik tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut bisa jadi karena Belanja Modal di kab/kota tidak menyebar secara merata. Bisa jadi Belanja Modal akan memberikan dampak signifikan jika data APBD dimasukkan dalam model.

Hipotesis kedua terjawab dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa penyaluran KUR memiliki dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan di Sulsel. Hipotesis ketiga juga terjawab dengan kesimpulan bahwa pembiayaan UMi juga memiliki dampak signifikan bagi penurunan tingkat kemiskinan di Sulsel. Hipotesis terakhir yakni pengaruh hadirnya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 terbukti memberikan dampak negatif berupa naiknya tingkat kemiskinan di Sulsel.

Berdasarkan penjelasan di atas serta dalam upaya peningkatan kinerja kebijakan fiskal dalam mengurangi tingkat kemiskinan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Aspek Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah perlu dakselerasi agar tidak menumpuk di akhir tahun. Semakin cepat direalisasikan maka multiplier effects belanja pemerintah akan semakin meningkat. Target realisasi menjadi salah satu indikator penilaian dalam IKPA sehingga efektif “memaksa” satker merealisasikan belanja sesuai target.

Hal lain yang penting untuk dilaksanakan adalah perbaikan kualitas belanja pemerintah (baik pusat maupun daerah). Obyek dalam penelitian ini memang hanya APBN, namun APBD juga memiliki alokasi anggaran besar. Oleh karena itu perlu sinkronisasi program antara APBN dan APBD sehingga tidak terjadi overlapping dalam penganggaran yang berakibat pada tidak optimalnya sumberdaya.

Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan kualitas belanja pemerintah. Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui redesign sistem penganggaran, penguatan kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Sejak diimplementasikan oleh DJPb beberapa tahun terakhir, kinerja pelaksanaan anggaran yang salah satunya diukur dari distribusi realisasi anggaran per triwulan, berjalan sesuai dengan target, yakni target di triwulan I 15%, akumulasi hingga triwulan II sebesar 40%, akumulasi hingga triwulan III sebesar 60%, serta minimal 90% hingga triwulan IV. Reformulasi IKPA di tahun 2022 bahkan memberikan tantangan lebih dengan kenaikan target realisasi berdasarkan proporsi pagu belanja satker. Inisiatif yang sama perlu diterapkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam APBD.

Dalam kapasitas sebagai Regional Chief Economist (RCE), Ditjen Perbendaharaan (DJPb) beserta seluruh unit vertikal di daerah telah mengambil berbagai strategis dalam peningkatan kualitas belanja pemerintah,

antara lain melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA).

Aspek Penyaluran KUR

Alokasi anggaran besar yang digelontorkan pemerintah dalam mendukung subsidi bunga program KUR mampu menyokong tumbuh kembangnya sektor UMKM, termasuk di saat hadirnya pandemi Covid-19. Namun tetap diperlukan upaya pengawasan atas implementasi di lapangan agar subsidi bunga tepat sasaran. Sebagai gambaran, pada kegiatan FGD Pembiayaan UMKM yang diselenggarakan KPPN Palopo pada 30 September 2021 dan dihadiri oleh pihak perbankan, lembaga keuangan, dan pemda, mengemuka mengenai masih ditemukannya fakta di lapangan bahwa terdapat KUR dicairkan oleh debitur yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan bukan untuk pengembangan usaha.

Pemda memiliki peran penting dalam mata rantai penyaluran KUR, yakni menyediakan data calon debitur yang memiliki potensi untuk berkembang namun mengalami keterbatasan modal. Data tersebut kemudian diinput ke dalam SIKP yang dikembangkan Kementerian Keuangan. Namun hasil evaluasi selama ini menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas data calon debitur yang diinput belum optimal sehingga belum dijadikan rujukan bagi perbankan untuk penilaian awal kelayakan usaha. Hal lain yang menjadi kendala adalah akses data calon debitur belum seluruhnya bisa dilakukan oleh cabang perbankan. Perlu upaya, baik dari sisi regulasi maupun implementasi, agar data calon debitur yang diinput oleh pemda akurat dan menjadi rujukan awal bagi pengambilan keputusan pemberian KUR oleh pihak perbankan.

Unit vertikal DJPb di daerah selama ini mendapat penugasan untuk melakukan survei secara sampling atas debitur terpilih sebagai bagian dari monitoring evaluasi atas penyaluran

KUR di wilayah. Namun peran yang diemban masih perlu dioptimalkan sehingga mampu mendeteksi ketidaktepatan sasaran program, baik melalui uji petik maupun hasil analisis data

Aspek Pembiayaan UMI

Sektor ultra mikro yang merupakan lapisan terbawah UMKM memiliki potensi besar berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan. Karena didominasi sektor informal yang rentan dan dekat dengan garis kemiskinan maka membutuhkan kehadiran pemerintah secara khusus. Keterbatasan akses pembiayaan dan pendampingan untuk memulai atau mengembangkan usaha dijumpai pemerintah melalui program UMI. Pembiayaan UMI yang baru berjalan sejak tahun 2017 memang belum tersosialisasi dan terakselerasi secara lebih masif. Oleh karena itu, perlu upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai telah hadirnya pembiayaan UMI di tengah-tengah masyarakat.

Berbeda dengan KUR yang bunganya sebagian disubsidi pemerintah, UMI tidak mendapat perlakuan yang sama. Laiknya program microlending, bunga yang dibebankan pada debitur cenderung lebih tinggi daripada bunga kredit perbankan umumnya. Hal tersebut salah satunya disebabkan adanya kewajiban pendampingan usaha dari penyalur UMI kepada para debitur sehingga berdampak pada biaya operasional lebih tinggi bagi penyalur. Untuk meniyasati hal tersebut, perlu melibatkan juga pihak pemda dalam berkontribusi membantu pendanaan program dan/atau menyubsidi bunga. KPPN Palopo di tahun 2021 lalu telah berhasil menjembatani kerjasama antara Pemda Luwu Utara dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam pendanaan bersama dan subsidi bunga UMI di wilayah Luwu Utara. Hal tersebut dipercaya akan semakin mengakselerasi penyaluran pembiayaan karena biaya yang dibebankan

kepada debitur akan sangat rendah.

Program pembiayaan UMi lahir dari inisiatif DJPb dalam mendukung pemberdayaan UMKM di lapisan terbawah yang rentan dengan garis kemiskinan. Dengan hasil analisis yang menunjukkan dampak UMi bagi penurunan tingkat kemiskinan, maka upaya akselerasi dan peningkatan kualitas penyaluran UMi perlu menjadi perhatian besar bagi jajaran DJPb, selaku RCE. Hal yang bisa dilakukan antara lain mengajak pemda untuk turut berkontribusi dalam pendanaan dan subsidi bunga UMi, serta peningkatan kualitas survei yang dilaksanakan KPPN secara periodik

KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Hasil analisis pada kajian ini tidak menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan teori secara umum. Semua variabel independen memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap tingkat kemiskinan. Namun implementasi kebijakan fiskal yang berada di bawah kontrol pemerintah, memberikan implikasi mengenai penguatan dampaknya bagi pencapaian tujuan bernegara. DJPb dan unit kerja vertikalnya yang diposisikan sebagai RCE harus mampu menjawab tantangan tersebut melalui peran mengawal akselerasi dan kualitas belanja pemerintah, penguatan survei dan money KUR dan UMi agar memberikan dampak lebih optimal bagi UMKM dan men-trigger penurunan tingkat kemiskinan.

Tim penulis menyadari bahwa sejatinya penelitian ini memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, diantaranya belum memasukkan beberapa variabel kebijakan fiskal dan treasury, termasuk belanja pemerintah daerah melalui APBD. Belanja pemerintah per fungsi bisa jadi akan lebih memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fungsi yang memiliki dampak paling besar dalam penurunan tingkat kemiskinan. Disarankan untuk penelitian lanjutan memasukkan data dimaksud ke dalam

model, sehingga akan memberikan gambaran riil dan arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Penelitian yang melibatkan variabel KUR dan UMi pun masih dapat dipertajam dengan analisis dampak berdasarkan penyaluran per sektor sehingga dapat diketahui sektor yang memberikan kontribusi besar bagi penurunan tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Antunes, A., Cavalcanti, T., Villamil, A. (2015). *The Effects of Credit Subsidies on Development*.
<http://www.jstor.org/stable/43562985>
Badan Pusat Statistik (2022). *Tabel Dinamis*.
Badan Pusat Statistik (2022). *Profil Kemiskinan di Sulawesi Selatan September 2021*.
Bappenas (2018). *Kebijakan Keuangan Negara (Fiskal)*.
Elisabete G.S.F. & Teresa F.B. (2019). *The impact of microcredit on poverty reduction in eleven developing countries in south-east Asia*.
Gujarati, D (2003). *Basic Econometrics (Fourth Edition)*. McGraw Hill.
Hendrawan Toni Taruno (2019). *Public Spending and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia 2009-2018*.
<https://doi.org/10.14710/ijpd.4.2.49-56>.
Hia, V.D.P, Handaka R.D & Zega Y.T. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil*.
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6(1), 75-84.
JN. Dahmardeh, M. & H. Tabar (2013). *Government Expenditures and its Impact on Poverty Reduction (Empirical From Sistan and Baluchestan Province of Iran)*.

- Kementerian Keuangan (2022). Program PEN Bantu Turunkan Jumlah Penduduk Miskin. Kementerian Keuangan (2022). APBN Kinerja dan Fakta (KiTA) Januari 2022.
- Lian A. Yusuf & Sri Indriyani Dai (2020). The Impact of Unemployment and Human Development Index on Poverty in Gorontalo Province 2008-2017. *Jambura Equilibrium Journal (JEJ)* Volume 2. Issue 1. January 2020.
- Maria Ulfa & M. Mulyadi (2020). Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar.
- Mark H. & Asmaa E. (2020). Fiscal Policy: Taking and Giving Away. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/fiscpol.htm>
- Miar & A. Yunani (2019). The Analysis of Influence of The Government Expenditure on Poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.18 No. 1.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB.2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.
- Sarwat Jahan, Ahmed S.M. & Chris Papageorgiou (2014). What Is Keynesian Economics? <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm>
- Subkhan (2018). Government Credit Guarantee (GCG) for The Improvement of People at The Bottom of The Economic Pyramid. <https://uia.e-journal.id/alarbah/article/download/597/361>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.